

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Table 1. Jenis Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian
1.	Debora Budiyono, Nuraini, dan Alfiyah (2021)	Merencanakan jalur interpretasi lanskap wisata pesisir sebagai desa wisata di Desa Purwodadi.	Jalur interpretasi lanskap wisata.	Deskriptif Kuantitatif
2.	Shobun Kollied Anwar, Agus Priyanto, Cepi Ramdani (2021)	Mendapatkan gambaran pengambilan keputusan tempat wisata di Kota Purwokerto.	Preferensi wisatawan terhadap pemilihan tempat wisata.	AHP(<i>Analytical Hierarchy Procces</i>)
3.	Debora Budiyono, Nuraini, dan Alfiyah (2020)	Mendapatkan gambaran potensi lanskap Desa Purwodadi sebagai objek desa wisata.	Lanskap Desa Purwodadi sebagai desa wisata.	<i>Focus Group Discussion</i>
4.	Edo Koriska, Desi Andreaswari, Asahar Johar (2019)	Mendapatkan deskripsi tentang sistem pendukung pemilihan objek wisata di Kabupaten Rejang Lebong.	Preferensi sistem informasi berupa website dan <i>virtual reality</i> 360 terhadap pemilihhan objek wisata.	AHP(<i>Analytical Hierarchy Procces</i>)
5.	Putri Taqwa Prasetyaningrum, Artika Sari (2019)	Mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang preferensi wisatawan asing non asia terhadap pemilihan objek wisata di Yogyakarta.	Preferensi wisatawan terhadap objek wisata.	AHP(<i>Analytical Hierarchy Procces</i>)

Perbedaan dan persamaan secara umum dalam penelitian terdahulu dan sekarang yaitu persamaan secara umum adanya penggunaan variabel yang sama yang meliputi beberapa preferensi, pengembangan wisata, dan nilai daya tarik wisata dan perbedaan secara umum terkait dengan tahun penelitian dan objek penelitian, pada penelitian ini dilakukan di pantai Lenggaksono, Desa Purwodadi Kabupaten Malang.

1.2. Lanskap

Lanskap merupakan suatu bentang alam yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu dimana keberadaan lanskap tersebut dapat dinikmati keberadaannya melalui indera yang dimiliki manusia. Menurut (Wibisono, 2008), lanskap adalah suatu areal lahan atau daratan yang memiliki kualitas visual bentukan lahan, formasi batuan, elemen air, dan pola tanaman yang berbeda. Sebuah lanskap memiliki karakteristik yang mencerminkan ciri khas dari sebuah lanskap. Beberapa ciri khas dan karakter dalam sebuah lanskap antar lain adanya harmoni atau kesatuan diantara elemen-elemen alam seperti: *ground forms*, formasi batuan, vegetasi, dan kehidupan satwa (*animal life*).

Sedangkan menurut (Purwanto, 2007) lanskap adalah wajah dan karakter lahan atau tapak dari bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia. Lanskap merupakan bagian atau total lingkungan dan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang sejauh segenap indra kita dapat menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan. Dalam bukunya, (Simond dan Starke, 2006) menambahkan bahwa lanskap adalah suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia.

1.2.1. Lanskap Pesisir

1. Fabianto, Beatly (2014), Pesisir pantai adalah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.
2. Musaddun (2013), pesisir pantai berkelanjutan (*Sustainable Marine Coastal*) adalah suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*) dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien.
3. Nurmalasari (2001), menurutnya dalam pesisir pantai diperlukan suatu pengelolaan yang harus berbasis masyarakat, artinya sistem pengelolaan tersebut mampu mengangkat masyarakat lokal agar terlihat secara aktif dalam proses pengelolaan yang terkandung di dalamnya. Baik dalam pemukiman, perikanan, pelabuhan, objek wisata, dan lain-lain, dengan begitu diharapkan tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir pantai semakin meningkat.

1.2.2. Lanskap Pantai

Landform pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya, termasuk kawasan yang dilindungi di sekitar pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan pantai. Lanskap pantai juga merupakan suatu sistem yang melibatkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik, serta pengaruh manusia. Lanskap ini membutuhkan analisis dan konsep terpadu dan dalam konteks wisata, perencanaan ataupun pengembangan lanskap pantai yang berfokus pada konsep *eco-landform* tersendiri. Lanskap pantai juga melibatkan berbagai aktivitas dan pembangunan yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pendekatan lanskap terpadu sering digunakan dalam pengelolaan lanskap pantai. Pendekatan ini mencakup berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dan bertujuan untuk menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu wilayah.

1.3. Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah komoditas ekonomi baru yang mulai dikembangkan. Dalam teori ekonomi yang lebih umum, keunggulan dari kompetisi pariwisata dinilai dari sisi permintaan. Seperti misalnya, wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi disebabkan oleh pendapatan orang, populasi negara wisatawan, biaya hidup, biaya transportasi kedua negara, nilai tukar, dan inflasi. Untuk memiliki keunggulan komparatif, pariwisata harus mengubah segi pembangunan dari sisi permintaan ke penawaran. Destinasi wisata kerap dikunjungi dikarenakan kondisi lingkungan, infrastruktur, dan nilai budaya (Murphy dkk., 2016).

Pengertian pariwisata menurut Burkat dalam (Damanik, 2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ketujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Menurut (Mathieson dan Wall dalam Pitana dan Gyatri, 2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Youti, 1991). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam

bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata “pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “Tour” Menurut (Mill dan Morisson, 1985). Ada beberapa variabel sosial ekonomi yang mempengaruhi permintaan pariwisata, yaitu:

a. Umur

Hubungan antara pariwisata dan juga umur mempunyai dua komponen yaitu: besarnya waktu luang dan aktifitas yang berhubungan dengan tingkatan umur tersebut. Terdapat juga beberapa perbedaan pola konsumsi antara kelompok yang lebih tua dengan kelompok yang lebih muda.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor terpenting dalam membentuk permintaan untuk mengadakan sebuah perjalanan wisata. Bukan hanya perjalanan itu sendiri yang memakan biaya wisatawan juga harus mengeluarkan uang untuk jasa yang terdapat pada tujuan wisata dan juga di semua aktifitas selama mengadakan perjalanan.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi tipe dari waktu yang luang untuk digunakan dalam perjalanan yang dipilih. Selain itu juga Pendidikan merupakan suatu motivasi untuk melakukan perjalanan wisata. dapat juga disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pandangan seseorang dan memberikan lebih banyak pilihan yang bisa diambil oleh seseorang.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang no 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia tuhan yang maha esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi pariwisata memang tidak pernah persis diantara para ahli. Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Tetapi apabila dilihat dari segi konteks pariwisata bertujuan untuk menghibur dan juga mendidik. Berdasarkan definisi pariwisata diatas maka disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan juga daerah tujuan (destinasi).
2. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan juga daya tarik wisata.
3. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pelaksana perjalananan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara.

5. Terdapat dampak yang ditimbulkan khususnya daerah tujuan segi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

1.3.1. Wisata

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah:

“Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Jadi, pengertian wisata mengandung empat unsur, yaitu kegiatan perjalanan; dilakukan secara sukarela; bersifat sementara; perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu:

a. Wisata Alam, yang terdiri dari:

1. Wisata pantai (*Marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
2. Wisata Etnik (*Etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
3. Wisata Cagar Alam (*Ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, Kesegaran hawa di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
4. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negri-negri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
5. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.

b. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari:

1. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti bekas pertempuran (*battle fields*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
2. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain

museum arkeologi, sejarah, entologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.

1.3.2. Wisata Pantai

Wisata pantai adalah kegiatan wisata santai dan tempat aktifitas rekreasi yang dilakukan dikawasan pesisir dan perairannya (Bibin, 2018). Wisata pantai memiliki beberapa kategori kegiatan berwisata yaitu rekreasi pantai, dimana rekreasi pantai bertujuan untuk mencari kepuasan dan menghilangkan rasa stress dengan melakukan kegiatan bersantai di pantai (Nugraha dkk., 2013). Wisata pantai kategori rekreasi memanfaatkan sumberdaya pantai seperti pasir putih, hamparan pantai, pemandangan (view), biota dan perairannya (Yulianda dkk., 2010).

1.4. Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kepentingan ini bisa berupa hak, saham, klaim, atau kewajiban yang dapat dipengaruhi oleh tindakan, kebijakan, atau tujuan suatu organisasi. *Stakeholder* dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dan kegiatan suatu perusahaan. Mereka biasanya memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan hingga proses implementasi. Landform pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya, termasuk kawasan yang dilindungi disekitar pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan pantai.

2.4.1. Stakeholder Wisata Pantai

Menurut (Reed dkk., 2009) menyebutkan bahwa *stakeholder* merupakan semua yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Dalam kegiatan wisata *stakeholder* menurut (Damanik dkk., 2006) menyatakan bahwa sebagai kelompok usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi tergantung kepada wisatawan yang sebagai pengguna jasa dan produk tersebut. *Stakeholder* yang dimaksud disini adalah baik dari pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal yang tinggal di daerah wisata.

Stakeholder dalam melibatkan diri dalam suatu pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dapat disebut dengan analisis *stakeholder*. Analisis tersebut menjadi proses pengumpulan secara sistematis dan analisis informasi secara

kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan atau penerapan suatu program atau kebijakan. Analisis *stakeholder* ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sifat kerjasama antara *stakeholder* yang berbeda, selain itu menunjuk secara tepat peluang untuk mengembangkan kerjasama dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* merupakan bagian penting dalam pengembangan lanskap wisata pantai yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk mejanlankan tujuan pengembangan lanskap pantai semakin meningkat. Dalam arti lain *stakeholder* merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap pengembangan lanskap kawasan wisata pantai Desa Purwodadi Malang.

Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata bertugas membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata, dan lain-lain. Pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata. Kepariwisataan membutuhkan banyak sarana pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, transportasi, dan lain-lain (Suwantoro, 2004). Sedangkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang menjadi keunikan dan ciri khas dari objek wisata.

Stakeholder dibedakan menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu pengambilan keputusan, *stakeholder* ini disebut juga *stakeholder* kunci. *Stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu pengambilan keputusan, *stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat/kepentingan secara tidak langsung atau pihak yang tergantung pada sebagian permasalahan pengembangan lanskap wisata, (Hetifah dalam Amalyah, 2006).

Istilah *stakeholder* atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu pengembangan lanskap kawasan wisata pesisir tertentu (Hadi dkk., 2011), pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengembangan lanskap kawasan wisata pantai. *Stakeholder* memiliki kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berada dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai terwujud. Menurut (Grimble and Wellard dalam Baso, 2006) ada tujuh prinsip dalam mengelola *stakeholder* yaitu:

1. Mengakui dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.
2. Menjalinkan komunikasi secara terbuka terkait kepentingan *stakeholder*.
3. Mengadopsi cara berperilaku dan kemampuan masing-masing *stakeholder*.
4. Mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara *stakeholder*.
5. Bekerja sama untuk memastikan bahwa resiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan.
6. Menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia (misalnya hak untuk hidup) atau menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima *stakeholder*, dan
7. Mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggung jawab *stakeholder* dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga. Dialog antara *stakeholder* menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan yang ada khususnya dalam pengembangan lanskap kawasan wisata pesisir Purwodadi Malang.

Stakeholder wisata melibatkan orang-orang pilihan untuk penggerakan perkembangan wisata itu sendiri. Dalam bidang pariwisata diperlukan juga sumber daya manusia yang berkualitas atau mempunyai kemampuan mengenai pengembangan lanskap kawasan wisata pesisir. (Wibisono, 2007), *stakeholder* diartikan sebagai suatu pihak maupun kelompok yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan.

(Hatifah dalam Amalyah, 2016), berdasarkan kekuatan posisi penting dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu *stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok yakni *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder yaitu:

1. *Stakeholder* primer merupakan setiap *stakeholder* yang berurusan langsung dengan permasalahan yang terjadi. Setiap *stakeholder* primer biasanya memiliki peran penting dan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Contoh *stakeholder* primer adalah pemegang saham, investor, pekerja, pelanggan, dan pemasok.
2. *Stakeholder* sekunder merupakan setiap *stakeholder* yang tidak berkaitan secara langsung dengan suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini para *stakeholder* biasanya tidak akan dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atas sebuah permasalahan tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan pemerintah. Contoh *stakeholder* sekunder adalah konsumen, pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan sebagainya.

2.4.2 Peran Stakeholder

Aspek sosial menyajikan peran yang penting dalam mendukung kinerja wisata. Aspek sosial bukan hanya mengidentifikasi *stakeholder* tapi juga menghasilkan manfaat yang optimal bagi masing-masing *stakeholder*. *Stakeholder* menurut (Nugroho, 2015) dalam wisata meliputi siapapun yang terlibat di dalam pengembangan wisata pesisir tersebut seperti penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat, sektor swasta dan pihak lain yang terkait dengan pengembangan kawasan lanskap wisata pesisir. Peran *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan lanskap wisata pesisir, bila dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu perlu adanya peran *stakeholder* dalam pengembangan kawasan lanskap wisata dimana *stakeholder* dalam sektor wisata meliputi siapapun yang berpengaruh dan dipengaruhi sektor pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu usaha wilayah. Bila dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan menjadi potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, untuk itu perlukan peran pemerintah untuk mengembangkannya wisata lanskap harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial dan cultural. Pengembangan pariwisata merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Menurut (Nugroho, 2015), peran *stakeholder* dalam pengembangan wisata sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu wilayah. Bila dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya peran dari:

a. Pemerintah Sebagai Fasililator

Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata seperti menyediakan dan memfasilitasi objek wisata. Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai sarana dan prasarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja disektor pariwisata. Sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan lanskap kawasan wisata pesisir.

2. Masyarakat

Pengembangan lanskap kawasan wisata tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta pihak lain, manfaat yang optimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhannya selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lain. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu peran yang dapat mendukung tercapainya suatu tujuan pengembangan yang dilakukan. Oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

1.5. *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Proses Hierarki Analitik (PHA) atau *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang pertama kali dikembangkan dengan tujuan, untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif (Saaty, 1970).

Analisis ini ditunjukkan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1993).

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:

- a. Dekomposisi, setelah mendefinisikan permasalahan atau persoalan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu: memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai yang sekecil-kecilnya.
- b. *Comparative Judgement*, prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.
- c. *Synthesis of priority*, dari setiap matriks *pairwise comparison* vektor *eigen* (ciri-nya) untuk mendapatkan prioritas lokal, karena matriks *pairwise comparison*

terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut hierarki.

- d. *Logical Consistency*, konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Keuntungan menggunakan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1993):

1. AHP memberikan model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur.
2. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
3. AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.
4. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
5. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
6. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
7. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan dalam setiap alternatif.
8. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
9. AHP tidak memaksakan konsensus tapi mensistensis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda.
10. AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang intangible (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat dibandingkan.